

Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Popy Nabila¹, Andriyus²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Email : popynabila@student.uir.ac.id

Abstrak

Pemberian bantuan pemerintah masih menjadi permasalahan hal ini dikarenakan kurang tepat sasaran pemberian bantuan yang diberikan, melalui program Keluarga Harapan di Desa Kapau Kecamatan Siak Hulu dengan memberikan bantuan bagi masyarakat miskin belum dilakukan secara merata. Pelaksanaan program Keluarga Harapan di Desa Kapau Kecamatan Siak Hulu tidak terlepas dari Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui serta faktor penghambat Program Keluarga Harapan Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan pelaksanaan program Keluarga Harapan di Desa Kapau Kecamatan Siak Hulu belum terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima bantuan tersebut secara merata. Kesimpulan Pelaksanaan program Keluarga Harapan di Desa Kapau Kecamatan Siak Hulu diketahui penerima bantuan belum didasarkan masyarakat miskin secara menyeluruh, kurangnya sosialisasi oleh kantor Desa adanya bantuan bagi masyarakat miskin sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui bantuan tersebut, dan kurangnya pendataan bagi setiap masyarakat yang terdaftar guna mengetahui kelayakan penerima bantuan tersebut. Saran peneliti yaitu agar pemerintah Desa dan pendamping kabupaten pelaksana Program Keluarga Harapan melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui adanya bantuan tersebut, melakukan pendataan kelayakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan dan memberikan bantuan secara merata bagi masyarakat miskin Desa Kapau.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Keluarga Harapan, Masyarakat Miskin.

Abstract

The provision of government assistance is still a problem because the assistance is not being properly targeted. Through the Family Hope program in Kapau Village Siak Hulu Regency assistance to the poor has not been distributed evenly. The implementation of the Family Hope Program in Kapau Village, Siak Hulu Regency cannot be separated from Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy. The purpose of this study was to determine the inhibiting factors of the Family Hope Program in Kepau Jaya Village Siak Hulu District Kampar Regency. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Discussion on the implementation of the Family Hope program in Kapau Village, Siak Hulu Regency has not been carried out optimally. This is because there are still many poor people who have not received the assistance evenly. Conclusion of the Implementation of the Family Hope Program in Kapau Village, Siak Hulu Regency, it is known that the recipients of assistance are not based on the poor community as a whole, the lack of socialization by the Village office regarding the existence of assistance for the poor so that many people do not know about the existence of this assistance, and the lack of data collection on each registered community to determine the eligibility of assistance recipients. The researcher's suggestion is that the Village Government and the district assistants implementing the Family Hope Program conduct outreach so that the community is aware of the assistance, conduct data collection on the eligibility of recipients of the Family Hope Program assistance and provide assistance evenly to the underprivileged community in Kapau Village.

Keywords: Evaluation, Family Hope Program, Poor Community.

PENDAHULUAN

Unsur pemerintah Daerah dalam melaksanakan program keluarga harapan (PKH) melalui Dinas Sosial Kabupaten Kampar dengan menetapkan pendamping PKH seorang tenaga pendamping yang bertugas untuk memberikan bantuan, pendampingan, dan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sendiri adalah program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Program keluarga harapan (PKH) merupakan salah satu instansi penyaluran dana program keluarga harapan yang akan di sebar luaskan ke seluruh kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Kampar.

Kabupaten Kampar masih ditemui masyarakat miskin atau kurang mampu Dimana rata-rata masyarakat miskin memiliki pekerjaan buruh lepas, petani dan mencari ikan tentunya hal ini menyebabkan indeks ekonomi masyarakat tersebut katagori rata-rata dibawa cukup sembari juga ditekankan oleh kebutuhan hidup sehingga banyak masyarakat masih ditemui dibawa tingkat ekonomi cukup.

Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kampar 2023 diketahui kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan dan memiliki populasi yang cukup ramai begitu juga angka kemiskinan Dimana diketahui angka kemiskinan yang paling tinggi pada kecamatan Siak Hulu, dan bangkinang Kota sedangkan yang paling sedikit pada kecamatan XIII Koto Kampar dan Tapung Hulu sehingga perlunya pemerintah daerah melakukan penaganan guna mengimbangi kebutuhan taraf hidup Masyarakat.

Kecamatan Siak Hulu salah satu kecamatan yang masih ditemui masyarakat miskin di dalam setiap Desa hal ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan Masyarakat dan hasil kerja Masyarakat belum mencukupi kehidupan kebutuhan keluarga secara cukup. Adapun berikut jumlah Masyarakat miskin di Desa Kecamatan Siak Hulu sebagai berikut:

Tabel I.

Masyarakat Miskin Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar 2023

No	Desa	Masyarakat Miskin (KK)
1	Buluh Cina	108
2	Buluh Nipis	117
3	Desa Baru	65
4	Kepau Jaya	129
5	Kubang Jaya	89
6	Lubuk Siam	104
7	Pandau Jaya	76
8	Pangkalan Baru	78
9	Pangkalan Serik	91
10	Tanah Merah	92
11	Tanjung Balam	88
12	Teratak Buluh	102
Jumlah		1.129

Sumber : BPS Kabupaten Kampar, 2023

Melihat kondisi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang rata-rata masyarakatnya bisa dikatakan belum sejahtera. Berdasarkan pengamatan sementara penulis terdapat

kesenjangan antara harapan dan kenyataan, program ini belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam pedoman Umum Program Keluarga Harapan. Adapun data masyarakat miskin penerima penyaluran dana bantuan PKH sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Desa Kepau Jaya Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah RTM (KK)	KPM PKH (Jiwa)
2021	75	42
2022	81	54
2023	99	43

Sumber : Desa Kepau Jaya, 2024

Berdasarkan table diatas Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Desa Kepau Jaya Tahun 2021-2023 dimana diketahui jumlah rumah tangguh miskin pada tahun 2021 sebanyak 75 kk sedangkan keluarga peneriman bantuan program keluarga harapan sebanyak 42 jiwa, 2022 sebanyak 81 kk sedangkan keluarga peneriman bantuan program keluarga harapan sebanyak 54 jiwa, dan 2023 sebanyak 99 kk sedangkan keluarga peneriman bantuan program keluarga harapan sebanyak 61 jiwa, sehingga dapat dilihat penerima bantuan PKH masih sedikit dari jumlah keluarga miskin disetiap tahunnya, tentunya hal ini menjadi tugas Dinas Sosial dalam pendataan dan pemberian bantuan PKH

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya Program Keluarga Harapan Desa Kepau Jaya sudah dilaksanakan secara langsung Dinas Sosial Kabupaten Kampar dengan melakukan pendataan bagi Masyarakat miskin yang layak menerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan namun pada kenyataannya masih jauh dari harapan Masyarakat hal ini dikarenakan masih banyak Masyarakat miskin yang belum menerima bantuan tersebut dan bantuan tersebut tergolong kecil dikarenakan besarnya biaya hidup yang dialami Masyarakat sehingga pencapaian bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan Desa Kepau Jaya belum tepat sasaran sesuai di tengah Masyarakat, Adapun secara terperinci fenomena Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa efektivitas penyaluran program keluarga harapan di Desa Kepau Jaya masih belum diterapkan secara merata bagi keluarga miskin atau keluarga sangat miskin akan tetapi masih saja ada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang mampu secara ekonomi namun ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dan terdaftar di data base kementerian sosial
2. Diketahui bahwa dimana masyarakat yang seharusnya menerima penyaluran dana bantuan sosial program keluarga harapan justru tidak terdaftar menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Diketahui bahwa kurang akuratnya data masyarakat miskin yang ditetapkan sehingga akan berdampak pada ketepatan penyaluran dana bantuan PKH kepada masyarakat yang berhak.

METODE PENELITIAN

Untuk menggambarkan dan menganalisis suatu peristiwa, penulis menggunakan semacam studi kualitatif deskriptif, dengan menganalisis fakta, realitas, kejadian, aktivitas, keterlibatan manusia, perilaku, dan berbagai persepsi dan sudut pandang

Menurut (Satori, Djam'an dan Komariah, 2009) penelitian kualitatif adalah proses investigasi yang didasarkan pada beberapa tradisi metodologis.

Informan diambil dari Kepala Desa sebagai Key Informan, dan yang menjadi informan yaitu Key Informan dan Informan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Kepau Jaya, Pendamping PKH Kabupaten, Masyarakat penerima bantuan PKH Kesehatan, Pendidikan dan Lansia serta Masyarakat tidak menerima bantuan PKH dengan keseluruhan berjumlah 8 orang. Analisis data pada penelitian ini adalah dengan Redukasi Data, Penyajian Data dan Menarik Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Tangkilisan, 2020) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan dengan tujuannya sebagai ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Menurut (Solichin, 2021) Kebijakan publik sering dirumuskan kedalam definisi yang sederhana yaitu sebagai segala sesuatu yang dikerjakandan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehinggadefinisi kebijakan publik diatas yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan atau yang dilakukan menjadi kurang memadai atau kurang tepat.

Menurut kriteria evaluasi menurut (Dunn, 2019) adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya
2. Efisiensi, yaitu berapa usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang yang diinginkan.
3. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapai hasil yang diinginkan memecahkan masalah
4. Pemerataan adalah apakah biaya yang tersedia telah tersedia, telah dimanfaatkan, dan telah didistribusikan secara merata.
5. Responsivitas, adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, profesi, dan nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketetapan, adalah apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Menurut (Soekanto, 2019) mengatakan bahwa kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental dan juga fisiknya dalam kelompok tersebut.

Adapun Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas

Diketahui bahwa Kegiatan pendataan bagi masyarakat miskin belum dilakukan secara merata bagi setiap penduduk sehingga dimana masih banyak Masyarakat miskin penerima bantuan yang selayaknya lebih layak menerima bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa kegiatan pendataan masyarakat miskin sudah dilakukan melalui RT dan di rapatkan di dusun guna diserahkan ke pendamping kabupaten pelaksana PKH guna ditetapkan menerima bantuan namun pada keyataannya pendataan masyarakat miskin tidak dilakukan secara merata sehingga sebagaian penduduk belum terdata dan ditetapkan selayaknya menerima bantuan PKH.

2. Efisiensi

Diketahui kemampuan kantor Desa dan pendamping kabupaten dalam pelaksana program PKH melalui pendataan bagi masyarakat miskin belum dilakukan secara maksimal dimana belum meratanya penduduk miskin belum terdata.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa kemampuan pelaksana program PKH mulai dari desa hingga pendamping kabupaten menetapkan masyarakat miskin penerima bantuan belum melakukan koordinasi dengan baik dimana pendamping kabupaten hanya menerima laporan masyarakat miskin dari kantor Desa namun belum melakukan pendataan kelapangan secara rinci, sehingga ditemui penerima bantuan PKH masih ada masyarakat lebih miskin yang belum menerima.

3. Kecukupan

Diketahui bahwa kerjasama Desa dengan pmdamping desa sudah dilakukan dengan melakukan pendataan pada Masyarakat miskin yang ada didesa, namun pada saat penetapan penerima bantuan banyak yang tidak dijadikan penerima bantuan PKH.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa kerjasama pelaku PKH di desa Kepau Jaya sudah melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin namun pada penetapan penerima PKH masih belum semua menerima hal ini dikarenakan audit kabupaten hanya menerima data dari kantor Desa sehingga sebagian masyarakat sangat miskin belum menerima bantuan tersebut.

4. Perataan

Diketahui bahwa penerima bantuan PKH yang ditetapkan kantor Desa belum tepat sasaran dimana masih banyak masyarakat miskin yang lebih layak menerima bantuan belum didata dan dijadikan peneriman bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa pemerataan penerima bantuan PKH belum dirasakan seluruh masyarakat miskin di desa Kepau Jaya dimana masih ditemui masyarakat miskin yang belum menerima bantuan tersebut dikarenakan belum masuk dalam pendataan oleh kantor Desa.

5. Responsivitas

Diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan RT bagi Masyarakat miskin terkait bantuan PKH hanya beberapa Masyarakat saja dan itu dipilih oleh RT dalam sehingga penerima bantuan tersbut juga banyak Masyarakat miskin belum menerimanya.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak Desa bagi masyarakat Desa terkait bantuan PKH dilakukan langsung oleh RT namun sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas bagi masyarakat yang telah ditetapkan oleh Desa sehingga sebagian masyarakat Desa tidak mengetahui adanya bantuan tersebut.

6. Ketetapan

Diketahui bahwa keberhasilan penerima bantuan PKH yang ditetapkan kantor Desa belum berjalan dengan baik dimana masih banyak masyarakat miskin yang belum didata dan menerima bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa keberhasilan penyaluran bantuan PKH belum dirasakan masyarakat secara merata hal ini dikarenakan belum dilakukan pendataan secara merata bagi masyarakat miskin sehingga sebagian masyarakat miskin belum terdata dan menerima bantuan tersebut.

SIMPULAN

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dilihat dari pertama Efektivitas, kedua Efisiensi, ketiga Kecukupan, keempat Perataan, kelima Responsivitas, dan keenam Ketepatan. Diketahui bahwa pelaksanaan PKH bagi masyarakat miskin belum terlaksana dengan maksimal Dimana masih banyak Masyarakat katagosri miskin belum terdata dan ditetapkan menerima bantuan tersebut hal ini dikarenakan kegiatan pendataan belum dilakukan secara merata oleh pemerintah Desa dan kegiatan penetapan penerima bantuan belum dilakukan audit secara terperinci oleh pendamping kabupaten sehingga penerima bantuan tersebut masih terlihat kurang tepat sasaran dikarenakan masih ditemui Masyarakat yang lebih miskin tidak ditetapkan menerima bantuan PKH dan kurangnya kegiatan sosialisasi ditegah Masyarakat terkait adanya bantuan PKH melainkan hanya RT memberikan informasih bagi warganya, dan kurangnya Kerjasama kantor Desa dengan pihak pendamping kabupaten pelaksana PKH dalam mendata dan menetapkan penerima bantuan sehingga tepat sasaran.
2. Sementara hambatan dalam Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Diketahui diketahui bahwa kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan kantor Desa Kepau Jaya terhadap masyarakat Desa terkait adanya bantuan PKH sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya bantuan tersebut melainkan hanya disampaikan melalui RT bagi masyarakat, diketahui pendataan masyarakat miskin oleh pemerintah Desa melalui RT belum dilakukan secara merata, penetapan penerima bantuan PKH belum pada katagori miskin dikarenakan masih ada masyarakat yang lebih miskin tidak ditetapkan menerima bantuan PKH, kurangnya pendataan audit oleh pihak pendamping Kabupaten atas penerimaan data miskin penerima bantuan melainkan hanya menerima data dari Desa, Rukun tetangnya sebagai pendamping Desa sebagai pelaksana PKH belum melakukan menampung keluhan masyarakat secara merata dikarenakan sebagian masyarakat miskin belum menerima bantuan tersebut, serta kurangnya kerjasama pendamping kabupaten dan Desa dalam melakukan penetapan penerima bantuan PKH sehingga setiap penerima PKH kebanyakan ditetapkan oleh Desa.

Saran

1. Sebaiknya RT melakukan pendataan masyarakat miskin secara merata sehingga dikethaui jumlah m,syarakat miskin yang layak menerima bantuan PKH.

2. Diketahui bahwa penetapan penerima bantuan PKH belum pada katagori miskin dikarenakan masih ada masyarakat yang lebih miskin tidak ditetapkan menerima bantuan PKH.
3. Sebaiknya pendataan atau audit oleh pihak pendamping Kabupaten atas penerimaan data miskin dari Desa untuk dilakukan secara terperinci sehingga penerima bantuan tersebut tepat sasaran.
4. Rukun tetangnya sebagai pendamping Desa sebagai pelaksana PKH sebaiknya melakukan menampung keluhan masyarakat dikarenakan sebagian masyarakat miskin belum menerima bantuan tersebut.
5. Sebaiknya pendamping kabupaten dan Desa meningkatkan kerjasama dalam melakukan penetapan penerima bantuan PKH sehingga setiap penerima PKH tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. (2019). Pengantar *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Solichin, Wahab, (2021), *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Tangkilisan, Hesel Nogi (2020). *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset

Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.

Tjiptono, Fandy. 2015. *Pemasaran Jasa, Edisi Pertama*, Yogyakarta, Penerbit Bayumedia Publishing.

Satori, Djam'an dan Komariah, A. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Surjadi, 2019. *Pengembangan kinerja Pelayanan Publik*. Malang, Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018, tentang (PKH) Program Keluarga Harapan